

SKRIPSI

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN EKONOMI INDIA DI BAWAH KEPEMIMPINAN
NARASIMHA RAO DAN NARENDRA MODI SERTA IMPLEMENTASINYA DI
KAWASAN ASIA TENGGARA**



*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional*

OLEH:
UCY LESTARI
E061191068

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN EKONOMI INDIA DI BAWAH KEPEMIMPINAN
NARASIMHA RAO DAN NARENDRA MODI SERTA IMPLEMENTASINYA DI
KAWASAN ASIA TENGGARA**

Disusun dan diajukan oleh:

UCY LESTARI

E061191068

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERBANDINGAN KEBIJAKAN EKONOMI INDIA DI BAWAH
KEPEMIMPINAN NARASIMHA RAO DAN NARENDRA
MODI SERTA IMPLEMENTASINYA DI KAWASAN ASIA
TENGGARA

N A M A : UCY LESTARI

N I M : E061191068

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 November 2023

Mengetahui :

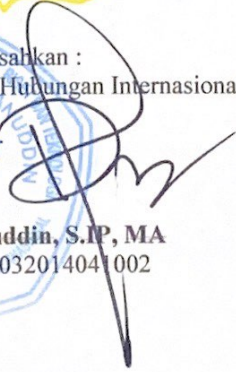
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002

Mengesahkan :
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERBANDINGAN KEBIJAKAN EKONOMI INDIA DI BAWAH
KEPEMIMPINAN NARASIMHA RAO DAN NARENDRA
MODI SERTA IMPLEMENTASINYA DI KAWASAN ASIA
TENGGARA

N A M A : UCY LESTARI

N I M : E061191068

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa,
31 Oktober 2023.

Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : UCY LESTARI

NIM : E061191068

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN EKONOMI INDIA DI BAWAH KEPEMIMPINAN
NARASIMHA RAO DAN NARENDRA MODI SERTA IMPLEMENTASINYA DI
KAWASAN ASIA TENGGARA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Oktober 2023

Yang menyatakan

A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp is yellow and orange, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METERAI TEMPEL", and "B402DAKX793947522".

(UCY LESTARI)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini tentunya terselesaikan dengan baik atas bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak **Fahri Dg. Siame** dan Ibunda penulis yang cantik **Eka Susanti**, yang penulis cintai dan sayangi. Penulis tidak akan berhenti berterima kasih sepanjang hidup penulis atas dukungan berupa kasih sayang, do'a, serta apapun itu yang sangat banyak diberikan pada penulis. Terima kasih telah sabar dan selalu mendukung penulis untuk mencapai semua mimpi penulis.
2. Saudara-saudari penulis, **Kak Mayang**, *independent women* yang selalu *support* adik-adiknya dalam segala hal, terima kasih kakakku semoga selalu lancar rezekinya. **Adik Arinda**, adik sekaligus sahabat sekamar penulis sejak kecil, terima kasih karena selalu ada. **Adik Ica**, **Adik Kaisar**, **Adik Farhan**, terima kasih sudah jadi adik-adik penulis yang selalu mendoakan penulis, semoga kita semua jadi orang yang berhasil.

3. Dosen Pembimbing skripsi **Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D** dan **Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** atas waktu, tenaga, serta proses edukasi yang diluangkan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.**, Sekretaris Departemen **kak Aswin**, serta jajaran dosen **Bapak Patrice, Bapak Imran Hanafi, Bapak Adi Suryadi, Bapak Husain, Bapak Munjin, Bapak Nasir Badu, Bapak Burhanuddin, Bapak Agussalim, Kak Jannah, Ibu Puspa, Kak Gego, Kak Atika**, terima kasih atas ilmu yang dibagikan kepada penulis, penulis berharap melalui ilmu yang penulis dapatkan dari perkuliahan dapat penulis gunakan untuk hal-hal positif dan bermanfaat bagi penulis dan bagi orang banyak. Para staff Departemen **Ibu Rahma**, dan **Pak Ridho** terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam mengurus seluruh administrasi perkuliahan hingga masa akhir pengurusan skripsi dan kelulusan.
5. Teman-teman **HISTORIA 19**, terima kasih atas bantuan secara langsung maupun tidak langsung yang teman-teman berikan selama perkuliahan berlangsung.
6. **Swaggiez**, terima kasih sudah menjadi bagian besar dalam masa perkuliahan penulis. **Chanas, Nanda a.k.a Aca**, dan **Ici**, Swaggiez adalah salah satu hal paling penulis banggakan selama perkuliahan.

7. Sahabat ter-*baku* bawa penulis, **Zahra a.k.a Uga** dan **Ici**. Terima kasih telah memberikan perhatian dan kehadiran yang penulis butuhkan, khususnya di masa-masa terakhir perkuliahan. Semoga kita semua langgeng.
8. **Tamu Kos**, terimakasih kepada semua member atas bantuan dan donasi keilmuan yang diberikan kepada penulis.
9. **Foskoh 7 Garuntungan**, terimakasih karena telah memberikan kenangan KKN terbaik untuk penulis. **Alief, Farah, Eca, Parbat, Nunu, Sire, Shafik, Zul, Pute, Erik, dan Anti** terima kasih untuk canda tawa, amarah, capek, dan semua kebahagiaan yang teman-teman berikan, kalian semua teman yang keren.
10. Teman-teman perkumpulan *nongsكري*, **Riswan, Uga**, terima kasih sudah menjadi pembimbing tambahan yang bisa dihubungi jam berapapun, terima kasih sudah sangat-sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. **Alif** terima kasih sudah menjadi teman nongsكري penulis dari awal penulis stor judul, walaupun akhirnya kamu *patta*. **Aca**, terima kasih sudah sengaja lambat-lambat supaya bisa dikejar dan semhas sama-sama. **Saldi, Mufly, Uta**, terima kasih sudah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan untuk teman-teman yang belum selesai, *yakin usaha sampai*. **Iccang, Farel, Akbar, Daffa, Hadi, dkk**, terima kasih selalu datang untuk cerita-cerita dan akhirnya tidak ada yang kerja skripsinya.
11. **HIMAH FISIP UNHAS**, terima kasih telah menjadi rumah tempat penulis mendapat banyak teman, ilmu, dan pengalaman. Untuk **Kak Gun, Kak Nita, Kak Novi, Kak Ryan, Kak Wais, Kak Cici, Kak Dian, Kak Tatu, Kak**

Rizky, Kak Asrul, Kak Ikrana, Kak Aweks, Kak Ilmi, Kak Ainil, Kak Eca, Kak Wira, Kak Zulmi, Kak Era, Kak Sukma, Aliyah, Alya, Alfreda, Iqbal, Balqies, Oni, Ius, Eca, Anes, Yaya, Cacan, Reul, Amirah, Fadel, Sabina, Chusnul, Aula, Leo, Auni, Uga, Harun, Odie, Rahim, Naya, Pute, Wiwi, Naurah, Rahmah, Azis, Fikrey, Didi, Jeje, Caca, Kaye, Haikal, Nuna, Ogi, Marwah, Balqis, Palbas, Qila, Qayla, Karin, Pudut, Athilah, dan semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari tempat belajar penulis di HIMAHl.

12. **Cubicles Coffee**, terima kasih cubic dan seluruh tim **Kak Ahri, Kak Ryan, Kak Alka, Kak Dre, Appal, Ali, Rangga, Anto**. Terima kasih sudah selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan studi, terima kasih karena sudah membiarkan penulis menggunakan AC, Wifi, dan segala fasilitas secara gratis.
13. **Muhammad Adrian**, terima kasih telah sangat banyak membantu penulis di masa akhir perkuliahan penulis. Terima kasih atas seluruh perhatian, dukungan, dan bantuannya dalam banyak hal kepada penulis. Semoga cepat menyelesaikan studinya.
14. Terakhir, penulis ingin berterima kasih pada **Ucy Lestari** karena sudah bertahan sejauh ini. *I want to thank her, because she cries for me, she feeds me, she prays for me, she sings for me, she buys everything for me, and she works very hard for me.*

ABSTRAK

Look East Policy merupakan kebijakan luar negeri India berbasis ekonomi yang digagas oleh Narasimha Rao pada tahun 1991. Kebijakan ini merupakan strategi India dalam menangani krisis ekonomi yang dialami pasca Perang Dingin. Setelah diterapkan selama kurang lebih dua dekade, Narendra Modi mengubah kebijakan tersebut menjadi *Act East Policy* dengan fokus dan sasaran yang lebih luas. Meskipun pada dasarnya dua kebijakan ini sama-sama bertujuan untuk membangun kerjasama yang intens dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, namun terdapat perbedaan-perbedaan faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan tersebut. Salah satu faktor yang membedakannya adalah faktor individu dari para pemimpinnya. Artikel ini menggunakan konsep analisis kebijakan luar negeri dan pendekatan Idiosyncratic oleh Margaret Hermann dan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan faktor idiosinkratik dibalik kebijakan *Look East* dan *Act East*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Narasimha Rao merupakan pemimpin dengan tipe *aggressive*. Hal ini dikarenakan Narasimha Rao merupakan pemimpin yang *high Nationalism*, *high belief in ability to control*, *high need for power*, *low conceptual complexity*, dan *high distrust to others*. Sedangkan, Narendra Modi masuk dalam tipe pemimpin yang *conciliatory* dikarenakan memiliki *high Nationalism*, *low belief in ability to control*, *high need for affiliation*, *high conceptual complexity*, dan *low distrust to others*. Serta dalam implementasinya, *Look East Policy* mengambil peran dalam menginisiasi, namun banyak program-program yang belum selesai hingga munculnya *Act East Policy*.

Kata kunci: *Look East Policy*, *Act East Policy*, Kebijakan Luar Negeri, Idiosinkratik

ABSTRACT

Look East Policy is an economic-based Indian foreign policy initiated by Narasimha Rao in 1991. This policy was India's strategy in dealing with the economic crisis experienced after the Cold War. After being implemented for about two decades, Narendra Modi changed the policy to Act East Policy with a broader focus and Objectives. Although basically these two policies both aim to build intense cooperation with countries in the Southeast Asian region, there are differences in the factors that influence the formation of these policies. One of the distinguishing factors is the individual factors of the leaders. This article uses the concept of foreign policy analysis and the Idiosyncratic approach by Margaret Hermann and this research seeks to explain the idiosyncratic factors behind the Look East and Act East policies. The results of this study show that Narasimha Rao is an aggressive type of leader. This is because Narasimha Rao is a leader with high Nationalism, high belief in ability to control, high need for power, low conceptual complexity, and high distrust to others. Meanwhile, Narendra Modi is the conciliatory type of leader because he has high Nationalism, low belief in ability to control, high need for affiliation, high conceptual complexity, and low distrust to others. And in its implementation, the Look East Policy took a role in initiating, but many programs were not completed until the emergence of the Act East Policy.

Keywords: Look East Policy, Act East Policy, Foreign Policy, Idiosyncratic

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual & Definisi Operasional.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Jenis Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	16
5. Metode Penulisan	16
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Analisis Kebijakan Luar Negeri	18
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III.....	38
GAMBARAN UMUM	38
A. Prinsip Kebijakan Luar Negeri India	38
B. Hubungan India dengan Asia Tenggara.....	44
C. Latar Belakang Narasimha Rao dan Narendra Modi.....	55
1. Narasimha Rao	55
2. Narendra Modi	58
BAB IV	62

PEMBAHASAN	62
A. Perbandingan Faktor Idiosinkratik <i>Look East Policy</i> dan <i>Act East Policy</i>.....	62
1. <i>Look East Policy</i>	64
2. <i>Act East Policy</i>	69
B. Perbandingan Implementasi <i>Look East Policy</i> dan <i>Act East Policy</i>....	74
1. <i>Look East Policy</i>	74
2. <i>Act East Policy</i>	78
BAB V.....	84
KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual.....	9
----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2 Perbandingan Faktor Idiosinkratik dari <i>Look East Policy</i> dan <i>Act East Policy</i>	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri India di masa kepemimpinan Narasimha Rao dan Narendra Modi. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan ekonomi yang berfokus pada Asia Tenggara. Pertama, penulis menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan oleh Narasimha Rao yaitu *Look East Policy*. Kebijakan ini bermula ketika runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin sehingga membuat India kehilangan mitra strategis terpentingnya dalam hal sumber bantuan keuangan dan militer, serta akses ke pasar di Uni Soviet dan Eropa Timur (Mazumdar, 2021, p. 357). India sebagai negara tentu saja perlu mengejar pasar lain ketika pasar yang ada sudah tidak berfungsi dalam hal pembangunan ekonomi. Peristiwa ini secara bersamaan menciptakan tantangan dan peluang bagi India untuk menciptakan hubungan baru dengan negara maju dan berkembang.

Ini membuat India mengarah pada keterlibatan Internasional yang lebih besar dengan komunitas internasional dan mencari mitra serta sekutu baru. Namun, lingkungan terdekatnya sendiri, Asia Selatan, tidak menawarkan banyak peluang untuk perdagangan dan investasi. Perselisihan politik dan kurangnya kepercayaan, serta keterbelakangan ekonomi di kawasan itu memaksa India untuk melihat ke Asia Tenggara dan Timur untuk mencari “padang rumput yang lebih hijau” (Kesavan, 2020). Asia telah menjadi tempat bagi semua keberhasilan

ekonomi besar di era pasca perang dunia kedua. Kebangkitan Jepang segera setelah perang, diikuti oleh Tiongkok dari 1980-an hingga 2010-an telah menggeser pusat gravitasi ekonomi global dari barat ke timur. Keunggulan kinerja negara-negara tersebut juga turut mengangkat perekonomian negara-negara di Asia Tenggara (Panagariya, 2022, p. 1). Melihat peluang itu, ketika Uni Soviet runtuh, India secara proaktif mengupayakan integrasi yang lebih besar dengan tetangganya di timur.

Sebagai tindakan taktis untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah India yang pada saat itu dipimpin oleh Narasimha Rao meliberalisasikan perdagangannya untuk meningkatkan sektor perdagangan dan memperluas pasar regional (Fadilah & Pambudi, 2020, p. 47). Meliberalisasikan perdagangan yang dimaksud adalah dengan membangun kerja sama dan kepercayaan yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik khususnya. Upaya ini dilakukan untuk tetap menjaga keseimbangan perekonomian India yang rentan setelah runtuhnya Uni Soviet.

Pada saat itulah, di tahun 1991, India di bawah kepemimpinan Narasimha Rao mengeluarkan kebijakan “*Look East*” dan diikuti oleh beberapa pergantian lain dalam strategi kebijakan ekonomi dan luar negeri India. Kebijakan *Look East* atau “melihat ke Timur” ini bertujuan untuk memperkuat ikatan ekonomi dan hubungan strategis yang luas dengan negara-negara Asia Tenggara sehingga bisa memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional dan penyeimbang pengaruh kekuatan Tiongkok (Sethy & Ranjan, 2022, p. 564). Seiringan dengan itu, hubungan politik dan kelembagaan India di kawasan Asia Pasifik juga diperdalam oleh kebijakan ini (Sharma, 2021, p. 41). Kebijakan ini menjadi salah satu upaya

India dalam memulihkan kondisi perekonomian yang terpuruk pasca perang dingin.

Kemajuan kebijakan ini dilihat dari keberhasilan India menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada tahun 1992, mitra dialog penuh pada tahun 1995, dan anggota *ASEAN Regional Forum* (ARF) pada tahun 1996. ARF merupakan platform utama untuk dialog multilateral tentang isu-isu politik dan keamanan yang menjadi perhatian kawasan Asia-Pasifik dengan mempromosikan langkah-langkah pembangunan kepercayaan dan melakukan diplomasi preventif di kawasan tersebut (Mazumdar, 2021, p. 359). Akses ke pasar India yang berkembang untuk perdagangan dan jasa menjadi prospek yang menarik bagi ekonomi negara-negara anggota ASEAN yang lebih berorientasi pada ekspor. Perdagangan bilateral India juga telah mengalami banyak kemajuan selama menerapkan kebijakan yang mengarah pada Asia Tenggara ini. Pertumbuhan perdagangan India merupakan yang tercepat dengan Asia Tenggara dibandingkan dengan wilayah lainnya antara tahun 1991 dan 1997 (Naidu, 2004, p. 342). Keberhasilan India menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada tahun 1992, 1995 menjadi kemajuan kebijakan bagi India. Selain itu berkembangnya akses pasar, perdagangan dan jasa menjadi prospek yang baik bagi India dan negara anggota ASEAN. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini membantu India tetap eksis di kawasan Asia dan membantu India membangun kepercayaan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Lalu, setelah beberapa tahun berlalu sejak kebijakan *Look East* resmi dikeluarkan oleh India, kebijakan ini kemudian mengalami beberapa perubahan.

Pada tahun 2014, ketika Narendra Modi resmi menjabat menjadi perdana menteri India, beliau menggagaskan kebijakan bernama *Act East Policy*. Kebijakan ini merupakan pembaharuan dari kebijakan sebelumnya, yaitu *Look East Policy*. Jika *Look East Policy* menaruh perhatian pada negara-negara ASEAN dan koordinasi ekonomi, *Act East Policy* yang digagaskan oleh PM. Narendra Modi pada tahun 2014 menambahkan negara-negara Asia Timur dan kerjasama pertahanan dan keamanan ke negara-negara ASEAN tapi tetap menambahkan kombinasi ekonomi pada fokusnya (Sethy & Ranjan, 2022, p. 564). Dapat dikatakan bahwa India mencoba memperdalam konektivitas India dengan Asia Tenggara untuk memperluas integrasi ekonomi dan politik India ke Asia Timur dan Pasifik secara keseluruhan melalui serangkaian ekonomi bilateral dan multilateral.

Narendra Modi menggagaskan *Act East Policy* sebagai versi lanjutan dari *Look East Policy* yang ruang lingkup dan pokok pembahasannya terbatas. Ini membuat *Act East* memiliki fokus dan tujuan yang lebih luas dan beragam. Salah satu contohnya, *Act East* mendapat lebih banyak perhatian bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, India telah menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil dengan Australia, Jepang, dan Korea Selatan; berhasil mendapat investasi asing dari Jepang untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur utama seperti transportasi kereta api berkecepatan tinggi; berpartisipasi dalam kerja sama keamanan dan pertahanan, termasuk latihan maritim bersama dengan Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Vietnam; meningkatkan hubungan jalan, kereta api, dan udara antara India dengan negara-negara Asia Tenggara,

khususnya Myanmar; terlibat dalam penjualan peralatan pertahanan ke Myanmar dan Vietnam; secara aktif mencari sumber daya energi dari beberapa negara di wilayah ini, khususnya Vietnam; dan menjangkau diaspora India di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, harapannya agar dapat menjadikan mereka sebagai pihak yang membawa kepentingan dalam pertumbuhan India (Mazumdar, 2021, p. 363). Kebijakan ini menunjukkan keseriusan India dalam meningkatkan posisi strategisnya di kawasan Asia-Pasifik dan meyakinkan negara-negara di kawasan ini untuk menjadikan India sebagai mitra bisnis.

Tidak hanya menguntungkan bagi India, namun India juga dianggap penting bagi negara-negara di Asia Tenggara khususnya untuk bidang ekonomi. Ini dikarenakan secara geopolitik, hampir semua negara di Asia menghadapi ancaman bersama yang meningkat dari ambisi Tiongkok yang semakin terbuka untuk hegemoni regional dan India merasa harus menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Arvind Panagariya dalam tulisannya berjudul “*Why northeast and southeast Asia must deepen their engagement with India*” juga menambahkan bahwa secara ekonomi, India mungkin satu-satunya ekonomi besar dunia yang menjanjikan (Panagariya, 2022, p. 2).

Pada dasarnya, kedua kebijakan ini tidak jauh berbeda bagaikan dua sisi pada koin yang sama. Dua kebijakan ini berupaya untuk mengukir tempat bagi India di Asia Pasifik yang lebih besar. Namun, perkembangan dunia internasional yang dinamis mendorong tiap negara untuk menyesuaikan tindakan atau kebijakannya. Sama halnya dengan India, Narasimha Rao membuat kebijakan *Look East* untuk menjaga stabilitas perekonomiannya pasca perang dingin dan

mencari mitra perekonomian baru di kawasan regional. Sedangkan *Act East* yang dibuat oleh Narendra Modi berlatar belakang tahun dan kondisi internasional yang berbeda. Sehingga penulis merasa penting untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pembeda dari kedua kebijakan ini, baik dari segi latar belakang internasional, kebutuhan domestik, hingga latar belakang pemimpin yang sedang menjabat pada masa tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai kebijakan luar negeri India *Act East* dan *Look East* telah menjelaskan mengapa India mengambil langkah untuk mengubah kebijakan luar negerinya yang berorientasi ke Timur dari *Look East* menjadi *Act East*. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Kebijakan Luar Negeri India dalam *Act East Policy*” dan ditulis oleh Meizaro Tifira Akbar pada tahun 2023 (Akbar, 2023). Penelitian ini menggunakan kerangka konsep Kebijakan Luar Negeri menurut perspektif Kalevi J. Holsti yang fokus analisisnya berdasarkan pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri. Dari penelitian tersebut, dihasilkan kesimpulan bahwa peningkatan hegemoni Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur serta meningkatnya aktivitas maritim Tiongkok di Samudera Hindia menjadi faktor eksternal dari terciptanya *Act East Policy*. Serta perlunya peningkatan dan pembangunan di kawasan timur laut India menjadi faktor internalnya.

Penelitian lain yang berjudul “*India’s Act East Policy and Implications for Southeast Asia*” pada 2016 menekankan mengenai strategi serta implikasi khusus dari strategi *Act East Policy* untuk Asia Tenggara. Penelitian ini

memaparkan mengenai implikasi *Act East Policy* dengan sedikit membandingkannya dengan versi sebelumnya dari kebijakan ini, yaitu *Look East Policy*. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa cakupan geografis yang lebih luas serta kedalaman strategisnya yang lebih besar membuat kepercayaan bahwa India telah bekerja keras dalam mewujudkan ambisinya untuk menjadi aktor regional.

Penelitian berjudul “*From ‘Look East’ to ‘Act East’: India’s Evolving Engagement with The Asia-Pacific Region*” pada tahun 2021 mengarah pada keterlibatan India dengan negara-negara Asia Pasifik dalam kebijakan *Act East Policy*. Ini menjelaskan mengenai kemitraan strategis India dengan negara-negara seperti Australia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi India serta menanggapi perluasan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut.

Penelitian-penelitian tersebut membahas kebijakan yang sama dengan penelitian yang akan penulis bahas kali ini namun dengan fokus yang berbeda. Melihat keseriusan India pada kebijakan ini, perlu diketahui seperti apa perbedaan dari kedua kebijakan ini. Dalam hal ini, perbedaan dalam faktor karakter individu dan perbedaannya dalam mengimplementasikan kebijakannya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis akan membatasi penelitian ini pada perbandingan kebijakan luar negeri India “*Look East Policy*” dan “*Act East Policy*” berdasarkan faktor idiosinkratik. Untuk mengerucutkan penelitian, penulis juga akan membatasi penelitian pada perbandingan

implementasi kedua kebijakan ini pada dua negara di Asia Tenggara yaitu Myanmar dan Thailand. Adapun rumusan masalah dari batasan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan faktor idiosinkratik dari *Look East Policy* dan *Act East Policy* India?
2. Bagaimana perbandingan implementasi kebijakan *Look East* dan *Act East* di Myanmar dan Thailand?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor idiosinkratik yang membedakan kebijakan *Look East* dan *Act East*.
2. Untuk mengetahui perbandingan implementasi kebijakan *Look East* dan *Act East* di Asia Tenggara khususnya di Myanmar dan Thailand

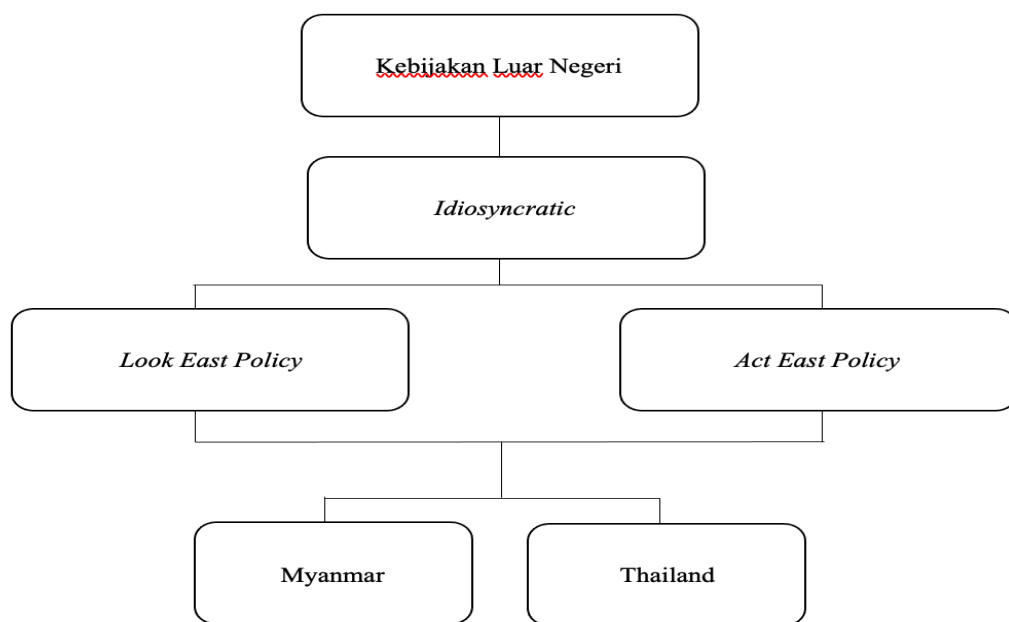
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan manfaat dalam keilmuan HI di isu kebijakan luar negeri khususnya kebijakan luar negeri India di bidang perekonomian.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi tambahan dalam keilmuan HI.

D. Kerangka Konseptual & Definisi Operasional

Dalam bagian ini, penulis menjelaskan konsep yang digunakan untuk penelitian kali ini. Penelitian kali ini menggunakan konsep Analisis Kebijakan Luar Negeri berdasarkan pada tingkatan Individu atau berfokus pada pengaruh

individu dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada bagian sebelumnya. Adapun bagan penelitian dan penjelasan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:



Bagan 1 Kerangka Konseptual

Analisis kebijakan luar negeri adalah studi tentang manajemen hubungan eksternal dan kegiatan negara-bangsa yang dibedakan dari kebijakan domestik mereka. Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, strategi, langkah-langkah, metode, pedoman, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang digunakan oleh pemerintah negara untuk melakukan hubungan satu sama lain dan dengan organisasi internasional maupun aktor non-pemerintahan lainnya (Sørensen, Møller, & Jackson, 2022, p. 250). Dalam pendekatan ini, analisis

kebijakan luar negeri tidak hanya memperhatikan aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan formal negara, tetapi juga berbagai sumber pengaruh sub-nasional terhadap kebijakan luar negeri negara.

Selain itu, dalam upaya untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai pilihan kebijakan luar negeri, para akademisi harus memperhitungkan batas-batas antara lingkungan internal atau domestik negara dan lingkungan eksternal (Alden & Aran, 2017, p. 3). Dalam bentuk yang lebih sederhana, analisis kebijakan luar negeri merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji faktor pengambilan keputusan suatu negara dalam memenuhi kepentingannya. Kebijakan luar negeri kemudian menjadi aktivitas yang sangat politis, mengingat sifat tatanan internasional yang tidak menentu.

Dalam analisis kebijakan luar negeri, terdapat *level of analysis* yang mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara. Dalam konteks skema HI yang terkenal dari David Singer, untuk bergulat dengan politik dunia, kita harus berfokus pada studi tentang fenomena di tingkat sistem internasional, tingkat negara (atau nasional), atau tingkat individu. Analisis kebijakan luar negeri secara tradisional menekankan tingkat negara dan individu sebagai bidang utama untuk memahami sifat sistem internasional (Alden & Aran, 2017, p. 3). Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki faktor tertentu yang mempengaruhinya, baik itu kendala yang dipaksakan oleh sistem internasional maupun peran individu.

Dalam level sistem internasional menjelaskan kebijakan luar negeri dengan menunjuk pada kondisi-kondisi dalam sistem antar negara yang memaksa

atau menekan negara-negara untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, yaitu mengikuti kebijakan luar negeri tertentu (Sørensen, Møller, & Jackson, 2022, p. 255). Pada tingkatan ini biasanya kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh suatu negara disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam sistem internasional.

Peran Individu dalam perumusan kebijakan luar negeri menjadi salah satu yang sangat penting. Dalam level ini, faktor-faktor seperti pengalaman para pemimpin dalam urusan luar negeri, gaya politik mereka, sosialisasi politik mereka, dan pandangan mereka yang lebih luas tentang dunia harus diperhitungkan untuk memahami perilaku kebijakan luar negeri mereka (Sørensen, Møller, & Jackson, 2022, p. 254). Tingkatan ini mencoba untuk menjelaskan latar belakang pemimpin suatu negara sebagai penyebab diambilnya suatu kebijakan.

Adanya tingkat analisis yang berbeda-beda menciptakan keragaman dalam kerangka tiap penelitian. Dalam konteks ini, jawaban dalam tiap pertanyaan penelitian menjadi sangat bervariasi tergantung tingkat analisis yang digunakan. Beberapa jawaban mungkin bersifat umum, didasarkan pada observasi terhadap pola aksi yang terus-menerus muncul di dalam struktur sistem internasional. Di sisi lain, terdapat pendekatan penelitian yang lebih mendalam dan mendetail. Pendekatannya lebih kepada memperhatikan perbedaan karakteristik antara aktor-aktor yang terlibat dalam sistem internasional. Sebagai contoh, pengkajiannya dapat difokuskan pada bagaimana kepribadian, nilai-nilai, atau sejarah seorang aktor dalam hal ini pengambil keputusan yang mempengaruhi keputusan

kebijakan yang mereka ambil. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pendekatan yang digunakan dalam penelitian memiliki nilai dan relevansi mereka sendiri, tergantung pada tujuan penelitian dan konteks yang diangkat dalam penelitian.

Menurut Margaret Hermann, menyoroti bahwa perbedaan tingkat karakteristik tiap individu dapat memicu variasi kepribadian setiap pemimpin. Perbedaan ini diyakini memainkan peran yang signifikan dalam pengaruh mereka terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, mengingat kepribadian seorang pemimpin dapat mencerminkan arah dan sifat kebijakan luar negeri negaranya. Ada dua tipe kepribadian utama yang diidentifikasi oleh Hermann, yaitu *aggressive* dan *conciliatory* (Jamilianti, 2020, pp. 14-15). Dengan kata lain, kepribadian pemimpin dapat membentuk dinamika kebijakan luar negeri tersebut, baik melalui pendekatan yang *aggressive* maupun *conciliatory* tergantung ciri khas kepribadian yang dominan.

Untuk menganalisa sifat *aggressive* ataupun *conciliatory* yang dominan dari seorang pemimpin negara, Hermann memetakan empat indikator (Jamilianti, 2020, p. 14), yaitu:

1. *Beliefs*, merupakan keyakinan mendasar seorang pemimpin tentang dunia. Dua ciri yang masuk dalam kategori ini adalah *Nationalism* dan *believe in one's own ability to control events*.
2. *Motives*, merupakan bagaimana cara pemimpin melakukan penafsiran terhadap lingkungan dan strategi yang akan digunakan. Ciri yang termasuk dalam kategori ini yaitu *need for power* dan *need for affiliation*.

3. *Decision style*, merupakan bagaimana pemimpin mengambil keputusan maupun mengeluarkan dan membuat keputusan. Ciri yang termasuk dalam kategori ini yaitu *conceptual complexity*.
4. *Interpersonal style*, merupakan bagaimana pemimpin memiliki ciri khas ketika berkomunikasi dengan kelompok atau pemimpin lainnya. Ciri yang termasuk dalam kategori ini yaitu *distrust of others*.

Pemimpin yang agresif memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan (*high need for power*), memiliki kompleksitas konseptual yang rendah (*low conceptual complexity*), tidak percaya pada orang lain (*low distrust of others*), nasionalis (*high Nationalism*), dan cenderung percaya bahwa mereka memiliki kendali atas peristiwa-peristiwa yang melibatkan mereka (*high belief in ability to control events*). Sebaliknya, pemimpin yang suka berdamai memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi (*high need for affiliation*), memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi (*high conceptual complexity*), percaya pada orang lain (*high distrust of others*), memiliki nasionalisme yang rendah (*low Nationalism*), dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuannya sendiri untuk mengendalikan peristiwa yang melibatkannya (*low belief in ability to control events*) (Hermann, 2014).

Selain itu, George Modelski juga memetakan beberapa komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan luar negeri. Komponen-komponen tersebut mencakup: 1.) *Orientations* yang mengacu pada sikap dan komitmen umum terhadap lingkungan eksternal dan mencakup strategi

dasar untuk mencapai tujuan domestik maupun internasional, terutama dalam mengatasi ancaman yang terus berlanjut; 2.) *National roles*, mengarah pada bagaimana pengambil keputusan dari suatu negara harus mempertimbangkan kepentingan negara, ideologi, norma, dan posisi geografisnya dalam bertindak untuk merespon situasi maupun isu tertentu; 3.) *Objective*, merupakan gambaran atau kondisi yang diharapkan dapat dicapai di masa depan dengan menggunakan pengaruh dari luar negeri dengan mengubah maupun mempertahankan perilaku negara lain; 4.) *Actions*, aktualisasi ini diambil untuk mempengaruhi orientasi tertentu, menjalankan tugas/peran, atau mencapai dan mempertahankan tujuan (Dugis, 2008, p. 102).

Dalam penelitian ini, akan menggunakan komponen dasar dari kebijakan luar negeri menurut Modelski dan juga pendekatan Idiosinkratik untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Upaya untuk menganalisis perbandingan implementasi dari *Look East Policy* dan *Act East Policy* dapat difokuskan pada komponen keempat menurut Modelski, yaitu actions. Dalam kasus ini, penulis akan berfokus pada implementasi *Look East Policy* dan *Act East Policy* sebagai sarana India untuk mencapai dan mempertahankan tujuan. Serta pendekatan Idiosinkratik untuk memfokuskan analisis perbandingan kebijakan India pada dua pemimpin berbeda. Pendekatan idiosinkratik oleh Margaret Hermann digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kecenderungan kepribadian seorang pemimpin dengan mengacu pada beberapa karakter yang telah dikategorikan oleh Hermann.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari dan menganalisis situasi sosial tentang isu atau fenomena tersebut, sehingga dapat menjelaskan dan menyajikan data-data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode ini penulis akan menjelaskan faktor pembanding dari dua kebijakan luar negeri India yaitu *Look East* dan *Act East* berdasarkan aspek individu para pemimpin yang menjabat pada masa kebijakan tersebut dirumuskan. Selain itu, penulis akan membandingkan secara khusus implementasi dua kebijakan tersebut di Thailand dan Myanmar. Dengan tipe deskriptif, digunakan untuk menggambarkan fakta yang empiris dengan argumen-argumen yang relevan. Kemudian dari hasil penjabaran tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik dan menjadi hasil dari penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sekumpulan data yang diperoleh melalui studi literatur/riset yang berkaitan dengan kebijakan *Look East* dan *Act East* serta pengimplementasiannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca literatur seperti Skripsi, Jurnal, buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dalam masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Adapun dalam menganalisis data tersebut dilakukan dengan menggambarkan fakta-fakta yang ada kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lain untuk menghasilkan sebuah argumen atau fakta yang empiris.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti yang kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis masalah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini kemudian akan diuraikan melalui beberapa bab agar isi utama dari tulisan ini bisa terpaparkan dengan baik. Adapun pembabakan dari tulisan ini akan dijabarkan melalui:

BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka memuat penjelasan lebih spesifik mengenai teori yang relevan dan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam mencari kebaruan penelitian.

BAB III Gambaran Umum mencakup kondisi perekonomian India dan hubungan multilateral antara India dengan negara-negara di Asia Tenggara.

BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian berisikan hasil penelitian mengenai perbandingan dari kebijakan *Look East* dan *Act East* yang didorong oleh profil individu para pemimpin yang memimpin pada saat kebijakan ini dirumuskan. Serta hasil penelitian yang membandingkan implementasi kedua kebijakan ini di Thailand dan Myanmar.

BAB V Kesimpulan berisi rangkuman dari seluruh rangkaian tulisan dan akan mencoba menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah yang merupakan intisari dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan aspek penting dalam hubungan internasional karena memiliki dampak yang signifikan terhadap politik global. Hal ini melibatkan strategi negara untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional dalam sistem internasional. Meningkatnya saling ketergantungan dan globalisasi di dunia telah menjadikan kebijakan luar negeri sebagai bidang studi yang semakin penting, karena negara-negara harus menavigasi lanskap global yang kompleks dan selalu berubah-ubah untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasionalnya. Setelah perjanjian Westphalia dan berakhirnya perang dunia pertama dan kedua, sistem internasional telah mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat dalam perkembangan negara bangsa.

Maka dari itu, hasil dari semakin berkembangnya negara menciptakan interaksi di antara negara-negara tersebut. Selain itu, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan proses dekolonisasi yang telah memerdekakan banyak negara menjadi entitas berdaulat telah memberikan dorongan terhadap hubungan antar negara. Hal tersebut telah menghasilkan pembentukan ‘kebijakan luar negeri’ dengan tujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi keputusan, strategi dan tujuan dari interaksi suatu negara dengan negara lainnya. Selain itu terjadinya globalisasi di dunia modern ini memberikan percepatan dalam keterkaitan global yang meningkatkan interaksi antar negara (AS, 2018).

Kebijakan luar negeri telah didefinisikan dengan berbagai cara oleh para ahli, namun para ahli meyakini bahwa hal ini berkaitan dengan perilaku suatu negara terhadap negara lain. Hermann, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan yang terarah dan terpisah yang dihasilkan dari keputusan tingkat politik seorang individu atau sekelompok individu. Dalam hal ini inti dari pendefinisian Hermann adalah kebijakan luar negeri merupakan perilaku negara. Kemudian George Modelski, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sistem kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mengubah perilaku negara lain untuk menyesuaikan kegiatan mereka dengan lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri harus menyoroti cara-cara yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengubah dan berhasil mengubah perilaku negara-negara lain. George Modelski juga memberikan catatan bahwa aspek-aspek kebijakan bertujuan untuk mengubah perilaku negara yang ada, sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri (AS, 2018).

Namun, Felix Gross memiliki definisi yang dapat dikatakan melangkah lebih jauh dari pendefinisian Modelski dengan menyatakan bahwa keputusan untuk tidak mempunyai hubungan dengan suatu negara sekalipun juga merupakan kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, tidak mempunyai kebijakan luar negeri yang pasti juga merupakan kebijakan luar negeri (Ahmad, 2020, p. 788). Artinya setiap tindakan atau keputusan suatu negara dalam merespon dunia internasional merupakan kebijakan luar negeri, dan keputusan untuk tidak merespon pun disebut sebagai respon.

Ada beberapa konsep utama yang penting dalam studi kebijakan luar negeri. Konsep-konsep ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami perilaku negara dalam sistem internasional; 1.) Kekuasaan adalah salah satu konsep terpenting dalam kebijakan luar negeri. Kekuasaan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain dan aktor non-negara dalam sistem internasional. Negara dapat menggunakan berbagai alat untuk menjalankan kekuasaan, seperti kekuatan militer, sanksi ekonomi, dan tekanan diplomasi; 2.) Keamanan adalah konsep kunci lainnya dalam kebijakan luar negeri. Keamanan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya, seperti membangun aliansi, memperoleh kemampuan militer, dan berinvestasi dalam bidang intelijen dan pengawasan; 3.) Diplomasi adalah alat penting dalam kebijakan luar negeri yang melibatkan negosiasi dan komunikasi dengan negara lain dan aktor non-negara. Diplomasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, membangun aliansi, dan melakukan promosi kerja sama; 4.) Kerja sama internasional adalah konsep kunci lainnya dalam kebijakan luar negeri. Negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama dan mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim dan terorisme. Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti integrasi ekonomi, pemeliharaan perdamaian, dan bantuan kemanusiaan (Senadeera, 2023, pp. 3-4). Tiap negara pastinya memiliki atau membutuhkan konsep-konsep ini dalam mengambil kebijakan luar negerinya.

Negara berada dalam sebuah sistem internasional yang dapat membatasi ruang gerak perilaku mereka. Dalam hal ini distribusi global, kekayaan ekonomi

dan kekuatan militer yang memungkinkan beberapa negara kuat untuk mengejar pilihan yang mereka sukai dalam kebijakan luar negeri, tetapi merugikan negara lain. Sebagai contoh, Republik Rakyat Tiongkok memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi politik regional dibandingkan Filipina atau Vietnam (Lantis & Beasley, 2017). Dalam hal ini, kebijakan luar negeri dimaksudkan sebagai media yang membawa kepentingan nasional tiap negara dalam tatanan sistem internasional.

Maka dari itu, menurut Csurgai tahun 2021, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal dan eksternal. Salah satu faktor internal penting yang mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah politik dalam negeri. Pertimbangan politik dalam negeri, seperti pemilihan umum dan opini publik dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Contohnya seorang pemimpin yang akan menghadapi pemilihan, dapat mengejar kebijakan luar negeri yang populer di kalangan masyarakat, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang negara. Selain itu faktor internal juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam bidang kepentingan ekonomi negara. Pertimbangan ekonomi seperti perdagangan dan investasi dapat membentuk tujuan dan strategi kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai contoh, sebuah negara dapat memprioritaskan hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu untuk mendapatkan akses ke pasar dan sumber daya (Senadeera, 2023). Jadi dapat dikatakan bahwa latar belakang pengambil keputusan, kepentingan pengambil

keputusan, serta kondisi-kondisi tertentu suatu negara dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pengambilan ataupun perumusan suatu kebijakan luar negeri.

Selain faktor-faktor internal yang sudah disebutkan, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu faktor eksternal yang penting adalah sistem internasional. Struktur sistem internasional, seperti perimbangan kekuatan dan keberadaan lembaga-lembaga internasional dapat membentuk keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai contoh, sebuah negara berusaha untuk membangun aliansi untuk mengimbangi negara yang lebih kuat dalam sistem internasional. Kemudian geografi juga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Lokasi dan kedekatan suatu negara dengan negara dan wilayah lain dapat membentuk tujuan dan strategi kebijakan luar negerinya. Sebagai contoh, sebuah negara yang terletak di wilayah yang bergejolak dapat memprioritaskan stabilitas dan keamanan dalam kebijakan luar negerinya (Senadeera, 2023).

1. Kebijakan Luar Negeri Menurut Modelski

Namun di luar dari tingkatan analisis ataupun faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dijelaskan di atas, ada juga komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam kebijakan luar negeri. Mengingat bahwa kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai aktivitas suatu negara dalam ranah internasional yang bertujuan untuk mengubah perilaku ataupun menyesuaikan perilaku negara lain, maka berikut adalah komponen-komponen dasar yang dikemukakan oleh George Modelski (Dugis, 2008, p. 102):

1. *Orientations*, ini mengacu pada sikap dan komitmen umum terhadap lingkungan eksternal, dan mencakup strategi dasar untuk mencapai tujuan domestik maupun internasional, terutama dalam mengatasi ancaman yang terus berlanjut. Strategi dan orientasi ini jarang terungkap dalam satu keputusan, namun merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif untuk menyesuaikan tujuan, nilai, dan kepentingan negara dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestik dan internasional.
2. *National roles*, merupakan definisi dari para pengambil keputusan mengenai keputusan umum, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai dengan negara mereka dan persepsi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan suatu negara dalam berbagai situasi maupun isu. Dalam hal ini mengarah pada bagaimana pengambil keputusan dari suatu negara harus mempertimbangkan kepentingan negara, ideologi, norma, dan posisi geografisnya dalam bertindak untuk merespon situasi maupun isu tertentu.
3. *Objective*, ataupun tujuan merupakan gambaran atau kondisi yang diharapkan dapat dicapai di masa depan dengan menggunakan pengaruh dari luar negeri dengan mengubah maupun mempertahankan perilaku negara lain.
4. *Actions*, adalah aktualisasi dari kebijakan yang dilakukan pemerintah suatu negara terhadap negara lain. Jika tiga komponen di atas merupakan gambaran dalam pikiran pembuat kebijakan,

sikap terhadap dunia luar, keputusan, dan aspirasi, maka tindakan atau aktualisasi ini diambil untuk mempengaruhi orientasi tertentu, menjalankan tugas/peran, atau mencapai dan mempertahankan tujuan.

2. Idiosyncratic

Dalam hubungan internasional, terdapat tingkat analisis yang mengacu pada tingkatan yang berbeda yang digunakan untuk menganalisis politik global. Terdapat tiga tingkat analisis utama yaitu, tingkat individu, tingkat negara dan tingkat internasional. Setiap tingkat memiliki perspektif yang berbeda tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan luar negeri (The Kootneeti Team, 2022). Berikut penjelasan terkait tingkat analisis:

1. Tingkat individu, tingkat analisis ini berfokus pada peran aktor individu, seperti politisi, pejabat, pemerintah dan warga negara. Sebagai contoh, analisis tingkat individu dapat memeriksa bagaimana keyakinan atau motivasi pribadi seorang pemimpin politik mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri mereka (The Kootneeti Team, 2022). Masa lalu pemimpin sebagai pemberontak atau revolusioner membuat para pemimpin lebih mungkin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik dan lebih mungkin mencoba menggunakan senjata nuklir, contohnya adalah Mao Zedong, Charles de Gaulle, Fidel Castro, dan David Ben-Gurion. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana psikologi dan pengalaman hidup para pemimpin mulai

dianggap serius dalam analisis kebijakan luar negeri (Sørensen, Møller, & Jackson, 2022, pp. 265-266).

2. Tingkat negara, tingkat analisis ini melihat peran dan pemerintah dalam membentuk hubungan internasional. Analisis ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan militer, kekuatan ekonomi dan institusi politik suatu negara yang berkaitan dengan kebijakan luar negerinya (The Kootneeti Team , 2022). Menurut Zakaria, Kebijakan luar negeri dibuat bukan oleh negara secara keseluruhan, melainkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, yang penting adalah kekuatan negara, bukan kekuatan nasional. Kekuatan negara adalah bagian dari kekuatan nasional yang dapat diambil oleh pemerintah untuk tujuan-tujuannya dan mencerminkan kemudahan bagi para pengambil keputusan di tingkat pusat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka (Sørensen, Møller, & Jackson, 2022, p. 259)
3. Tingkat internasional, tingkat analisis ini mengkaji peran organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa atau organisasi perdagangan dunia dalam membentuk politik global. Analisis ini juga melihat peran kekuatan ekonomi dan budaya, serta interaksi antar negara dalam sistem internasional (The Kootneeti Team , 2022). Namun, beberapa teori mengenai sistem internasional tidak sepenuhnya sepakat mengenai ‘kondisi-kondisi’ yang menjadi ciri utama dari sistem tersebut. Contohnya kaum realis berfokus pada

anarki dan persaingan antar negara untuk mendapatkan kekuasaan dan keamanan; kaum liberal melihat adanya ruang yang lebih besar untuk kerja sama karena adanya lembaga-lembaga internasional, saling ketergantungan ekonomi, dan keinginan bersama dari negara-negara untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan (Sørensen, Møller, & Jackson, 2022, p. 256).

Para pemimpin menduduki puncak pemerintahan. Dalam banyak sistem politik, kepala negara atau kepala pemerintahan memiliki kewenangan besar untuk mengalokasikan sumber daya negara dan membuat kebijakan luar negeri. Sebagai contohnya peran kepemimpinan dalam kebijakan luar negeri negara-negara Arab, pengaruh Presiden Dilma Rousseff terhadap kebijakan luar negeri Brazil selama satu dekade dan dampak dari para pemimpin terhadap program senjata nuklir di Prancis, Australia, Argentina dan India (Lantis & Beasley, 2017). Ini membuktikan bahwa para pemimpin yang merupakan pengambil keputusan suatu negara memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap arah maupun haluan kebijakan luar negeri suatu negara.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Hermann dan Levy pada tahun 1980 dan 2003 yang menunjukkan bahwa karakteristik individu pemimpin penting dalam mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Dalam kondisi seperti itu, kepribadian dan keyakinan seorang pemimpin mungkin sangat berpengaruh dalam kebijakan luar negeri, tetapi menentukan apakah pemimpin telah mempengaruhi kebijakan luar negeri

atau tidak dapat menjadi tantangan. Selain itu faktor sejarah pribadi pemimpin juga dapat berpengaruh seperti pengalaman masa kecil atau pengalaman politik awal yang telah mengajarkan para pembuat kebijakan tentang pentingnya nilai-nilai dan cara-cara tertentu dalam menangani masalah. Kognisi dan sistem kepercayaan para pemimpin juga mempengaruhi kebijakan luar negeri. Kemudian manusia akan lebih cenderung memiliki konsistensi dalam mengatur dunia di sekitar mereka dan dengan demikian sering mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini (Lantis & Beasley, 2017).

Margaret Hermann berpendapat bahwa meneliti keistimewaan, karakteristik dan kepribadian, prediksi mengenai pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dapat dibuat karena penelitian tersebut dapat menciptakan gambaran yang jelas mengenai kemungkinan perilaku pribadi, yaitu kecenderungan. Prediksi biasanya dibuat melalui pemetaan kognitif dan analisis proses kognitif dan psikologis yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali bahwa kepribadian dan kognisi dengan mengaitkannya (Smith, 2012, p. 2).

Adapun enam karakteristik yang dimiliki seorang pemimpin yang telah dikategorikan oleh Hermann (Sampurna, 2019, p. 36), yaitu:

1. *Nationalism*, yaitu rasa nasionalisme atau karakter yang memandang bangsa adalah pusat dari segala perhatian dan adanya ikatan emosional yang kuat antara individu pemimpin dengan bangsanya sehingga mendorong pemimpin berambisi untuk

menegakkan atau menaikkan kehormatan dan identitas nasional dari negaranya.

2. *Belief in One's Own Ability to Control Events* yaitu kepercayaan pada kemampuan diri yang dapat mengontrol lingkungan sekitarnya termasuk orang lain, ini diartikan bahwa karakter ini mempercayai bahwa seseorang dapat membawa pengaruh bahkan mengontrol lingkungannya dengan pemikiran bahwa mereka dapat mempengaruhi pihak lain baik individu maupun kelompok lain.
3. *Need for power* yaitu keinginan untuk memperoleh dan mempertahankan pengaruh serta kekuatan yang bersifat dominan, mengontrol, dan mempengaruhi orang lain dengan tujuan untuk mempertahankan posisi serta mendapatkan respon yang diinginkan.
4. *Need for affiliation* yaitu keharusan untuk mengembangkan relasi yang positif merujuk pada sifat karakter yang berupaya memulihkan dan membangun hubungan yang akrab dan baik dengan individu atau kelompok lain.
5. *Conceptual complexity*, kompleksitas konseptual merujuk pada tingkat perbedaan dalam cara seseorang mendiskusikan atau mengatasi kebijakan, ide, permasalahan, serta individu atau kelompok lain. Menurut Hermann, semakin besar kompleksitas konseptual seorang pemimpin, semakin rendah minatnya pada

urusan asing. Selain itu, individu cenderung kurang mengakui kebutuhan untuk melakukan perubahan ketika mereka memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, Hermann menyimpulkan bahwa semakin tinggi kompleksitas seorang pemimpin, semakin banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan, sehingga membuat lebih sulit bagi pemimpin untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang agresif.

6. *Distrust of others* yaitu karakter yang sulit percaya atau skeptis pada individu maupun kelompok lain dikarenakan adanya keraguan, kegelisahan, dan rasa was-was yang mengarah pada keraguannya terhadap motif dan tindakan individu dan kelompok lain.

Ada dua tipe kepribadian utama yang diidentifikasi oleh Hermann, yaitu *aggressive* dan *conciliatory* (Jamilianti, 2020, pp. 14-15). Pemimpin yang agresif memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan (*high need for power*), memiliki kompleksitas konseptual yang rendah (*low conceptual complexity*), tidak percaya pada orang lain (*low distrust of others*), nasionalis (*high Nationalism*), dan cenderung percaya bahwa mereka memiliki kendali atas peristiwa-peristiwa yang melibatkan mereka (*high belief in ability to control events*). Sebaliknya, pemimpin yang suka berdamai memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi (*high need for affiliation*), memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi (*high conceptual complexity*), percaya pada orang lain (*high distrust of others*), memiliki nasionalisme

yang rendah (*low Nationalism*), dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuannya sendiri untuk mengendalikan peristiwa yang melibatkannya (*low belief in ability to control events*) (Hermann, 2014).

Dengan kata lain, kepribadian pemimpin dapat membentuk dinamika kebijakan luar negeri tersebut, baik melalui pendekatan yang *aggressive* maupun *conciliatory* tergantung ciri khas kepribadian yang dominan. Enam karakteristik tadi mewakili empat jenis karakteristik pribadi yang memiliki dampak pada konten serta cara pengambilan keputusan. Empat jenis karakter pribadi ini akan membantu menganalisis kecenderungan seorang pemimpin, baik itu *aggressive* maupun *conciliatory*. Empat karakter tersebut adalah (Jamilianti, 2020, p. 14):

1. *Beliefs*, merupakan keyakinan mendasar seorang pemimpin tentang dunia. Dua ciri yang masuk dalam kategori ini adalah *Nationalism* dan *believe in one's own ability to control events*.
2. *Motives*, merupakan bagaimana cara pemimpin melakukan penafsiran terhadap lingkungan dan strategi yang akan digunakan. Motif menjadi alasan mengapa seorang pemimpin melakukan apa yang dia lakukan. Ciri yang termasuk dalam kategori ini yaitu *need for power* dan *need for affiliation*.
3. *Decision style*, merupakan bagaimana pemimpin mengambil keputusan maupun mengeluarkan dan membuat keputusan. Ciri yang termasuk dalam kategori ini yaitu *conceptual complexity*.

4. *Interpersonal style*, merupakan bagaimana pemimpin memiliki ciri khas ketika berkomunikasi dengan kelompok atau pemimpin lainnya. Ciri yang termasuk dalam kategori ini yaitu *distrust of others*.

Dalam penelitian ini, akan menggunakan komponen dasar dari kebijakan luar negeri menurut Modelski dan juga pendekatan Idiosinkratik untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Dikarenakan kebijakan luar negeri terdiri dari komponen-komponen tersebut, maka upaya untuk menganalisis perbandingan implementasi dari dua kebijakan tersebut dapat difokuskan pada komponen keempat menurut Modelski, yaitu actions. Dalam kasus ini, penulis akan berfokus pada implementasi *Look East Policy* dan *Act East Policy* sebagai sarana India untuk mencapai dan mempertahankan tujuan. Serta pendekatan Idiosinkratik untuk menganalisa latar belakang Narasimha Rao dan Narendra Modi dalam perumusan kebijakannya. Pendekatan idiosinkratik oleh Margaret Hermann digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kecenderungan kepribadian seorang pemimpin dengan mengacu pada beberapa karakter yang telah dikategorikan oleh Hermann.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian, penelitian terdahulu merujuk pada analisis-analisis sebelumnya dengan topik yang serupa. Tujuan utama dari adanya penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti, serta untuk menemukan pembanding antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan menganalisis

penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti akan mengidentifikasi kekosongan dalam penelitian yang masih perlu dijelajahi lebih lanjut atau dapat memperkuat arah penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba mengkaji penelitian terdahulu mengenai topik ini, sebagai berikut:

1. *Involving India's Look East to Act East Policy: An Analysis View, oleh Sanjeev Kumar Bragta (2021).*

Penelitian ini berusaha untuk menganalisa perubahan atau perkembangan kebijakan *Look East* menjadi *Act East*. Dalam penelitian ini, Bragta mencoba untuk mengaitkan sejarah dan politik India terhadap *Look East* maupun *Act East*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dan mengkaji kerjasama ekonomi dan dimensi strategis India melalui kebijakan *Act East* di masa pemerintahan Narendra Modi. Bragta kemudian menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dalam kaitannya dengan *Look East Policy* ke *Act East Policy* telah terjadi pergeseran paradigma atau kondisi-kondisi tertentu di bawah pemerintahan Narendra Modi dalam beberapa tahun terakhir. Adanya Covid-19 dan banyaknya masalah domestik yang mendorong perluasan aktivitas regionalnya. Masalah utama dalam dua kebijakan ini adalah integrasi ekonomi regional dan keamanan di kawasan karena meningkatnya kehadiran Tiongkok di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.

2. Analisis Gaya Kepemimpinan Narendra Modi Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri *Look East* ke *Act East*, oleh Muhammad Iqbal Anta Maulana dan Muhammad Faizal Alfian (2022).

Penelitian ini membahas mengenai perubahan kebijakan luar negeri India dari *Look East* menjadi *Act East* di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam menjawab mengapa perubahan kebijakan tersebut bisa terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Maulana dan Alfian menggunakan teori leader trait analysis dalam penelitiannya. Teori ini mengemukakan bahwa ada empat gaya kepemimpinan diklasifikasikan menurut tanggapan pemimpin terhadap kendala dan keterbukaan informasi, yaitu: Crusader, Strategist, Pragmatist, dan Opportunist.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini memaparkan hasil kualifikasi Narendra Modi pada aspek belief in ability to control events, *need for power*, self-confidence, *conceptual complexity*, task focus, ingroup bias, dan *distrust of others*. Dari aspek-aspek tersebut, dihasilkan bahwa gaya kepemimpinan Narendra Modi yang opportunist yang menyebabkan adanya perubahan kebijakan luar negeri India. Secara singkat, Modi merupakan pemimpin yang cenderung memilih membangun kerja sama sebagai metode penyelesaian masalah.

3. “*Act East Policy as India’s Respond to Tiongkok Expansion*, oleh Nasta Indraswari (2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri India dari *Look East* ke *Act East* dalam tantangannya menjadi kekuatan terbesar di dunia khususnya Asia Selatan. Meningkatnya kekuatan Tiongkok di wilayah tersebut juga menjadi tantangan bagi India. Perubahan kebijakan luar negeri ini juga dipicu oleh strategi Tiongkok yang ingin memasuki pasar Eropa yang jalur perdagangannya melalui negara-negara pesisir Samudra Hindia termasuk Asia Selatan. Strategi ini terkenal dengan sebutan The String of Pearls dan One Belt One Road (OBOR). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan India untuk mengubah kebijakannya dari *Look East* menjadi *Act East* bertujuan untuk menahan dan mengimbangi kekuatan Tiongkok di Samudra Hindia karena wilayah ini merupakan perairan yang penting bagi India.

4. Analisis Kebijakan luar Negeri India dalam *Act East Policy*, oleh Meizaro Tifira Akbar dan Nuraeni (2023)

Penelitian ini memuat pembahasan mengenai *Act East Policy* sebagai salah satu kebijakan luar negeri India. Dalam penelitian ini, Akbar dan Nuraeni menganalisis faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara menggunakan perspektif milik Kalevi J. Holsti. Di samping itu, penelitian ini juga mencoba melihat latar belakang dari perumusan *Act East Policy*.

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor geografis seperti keterbatasan akses India dalam bidang maritim ke kawasan Asia-Pasifik dan terbatasnya akses India menuju wilayah timur laut India, menjadi salah satu

faktor internal terbentuknya *Act East Policy*. Dan salah satu faktor eksternal yang diidentifikasi adalah bangkitnya kekuatan dominan baru khususnya Tiongkok di kawasan Asia. Pada saat itu, Tiongkok telah menjadi aktor utama dalam geopolitik regional dan global. Kekuatan ekonomi dan militer milik Tiongkok semakin mendominasi di kawasan Asia, sehingga mempengaruhi cara India dalam melihat peran dan posisinya di kawasan tersebut.

N O	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN	TEORI/ KONSEP	PERBEDAAN
1	Sanjeev Kumar Bragta, 2021	<i>Evolving India's Look East to Act East Policy: An Analysis View</i>	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pergeseran kebijakan dari <i>Look East Policy</i> menjadi <i>Act East Policy</i> disebabkan oleh adanya perubahan kondisi dari masa kepemimpinan Narasimha Rao dengan Narendra Modi. Salah satu kondisi tersebut adalah Covid-19 yang menghambat perluasan aktivitas regional dan global.	Pendekatan Diplomatik dan Kebijakan Luar Negeri	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penyebab perubahan dua kebijakan tersebut, sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada faktor individu dalam pembuatan dua kebijakan ini. Serta penelitian terdahulu ini tidak terlalu menyasar pada Asia Tenggara secara luas, sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada negara-negara tertentu di Asia Tenggara.
2	Muhammad Iqbal Anta Maulana dan Muhammad Faisar Alfian, 2022	Analisis Gaya Kepemimpinan Narendra Modi Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri <i>Look East</i> ke <i>Act East</i>	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dari pemimpin suatu negara salah satu faktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Gaya kepemimpinan Modi yang cenderung opportunist membuat India menciptakan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan kerjasama yang lebih	Leader Trait Analysis	Perbedaan terdahulu ini hanya berfokus pada profil Narendra Modi dalam merumuskan <i>Act East Policy</i> . Sedangkan dalam penelitian penulis, profil Narendra Modi akan dibandingkan dengan profil Narasimha Rao dalam merumuskan <i>Look East Policy</i> .

			luas di kawasan Asia Pasifik.		
3	Nasta Indraswari, 2018	<i>“Act East” Policy as India’s Respond to Tiongkok Expansion</i>	Adanya strategi Tiongkok berupa String of Pearls dengan mendominasi kehadiran militer dan angkatan laut di wilayah Samudera Hindia, serta OBOR dengan ambisi ekonominya memaksa India merubah kebijakan <i>Look East</i> menjadi <i>Act East</i> . Hal ini juga dilakukan karena India memiliki kepentingan ekonomi di wilayah tersebut dan mencoba untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok.	Hegemonic Stability Theory dan Securitization Theory	Penelitian terdahulu ini berfokus pada perlombaan kekuasaan di wilayah Samudera Hindia antara Tiongkok dan India yang akhirnya menciptakan <i>Act East Policy</i> , sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada faktor individual dalam terciptanya kebijakan <i>Act East</i> maupun <i>Look East</i> .
4	Meizaro Tifira Akbar dan Nuraeni, 2023	Analisis Kebijakan Luar Negeri India dalam <i>Act East Policy</i>	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terciptanya kebijakan <i>Act East</i> . Terbatasnya akses maritim India ke kawasan Asia Selatan dan juga wilayah laut India serta berbagai masalah domestik lainnya menjadi faktor pendorong internal dari kebijakan ini. Serta bangkitnya kekuatan dominan Tiongkok di kawasan tersebut juga merupakan faktor eksternal dari terbentuknya kebijakan ini.	Kebijakan Luar Negeri menurut Kalevi J. Holsti	Penelitian terdahulu ini berfokus pada faktor internal dan eksternal secara umum yang mendorong India merumuskan <i>Act East Policy</i> . Adapun penelitian tersebut menggunakan perspektif Kalevi J. Holsti, hal tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang akan berfokus pada faktor individu dalam pembentukan <i>Look East</i> dan <i>Act East</i> dan membandingkan keduanya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu